

Implementasi Program Penelitian dan Pembangunan Daerah Di Bidang Litbang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Situbondo

Fahrudin¹, Moh. Ulil Absor Hamdani², Abdul Qodir³, Ali Mundzir⁴

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

E-mail: fahrudin@unuja.ac.id¹, deni16741@gmail.com², abdulqodir8885@gmail.com³, alimundzir503503@gmail.com⁴

Article History:

Received: 15 Desember 2024

Revised: 01 Januari 2025

Accepted: 03 Januari 2025

Keywords: *Implementation, Research, development, Bappeda Kabupaten Situondo.*

Abstract: *The aim of this research is to determine the implementation of the Research and Development (R&D) Program at the Agency Situbondo Regency Regional Development Planning (Bappeda) in 2024, and knowing the driving and inhibiting factors for the Implementation of the Research and Development (R&D) Program at the Situbondo Regency Regional Development Planning Agency in 2024. Using qualitative descriptive research methods, with method collecting data obtained from field observations, interviews with several informants from the Head of Division, Head of Sub-Division, to staff. Then literature study obtained from various regulations and documentation. The inhibiting factor encountered during the implementation or implementation of programs in the R&D sector is the diversity of understanding, perception and background of each employee giving rise to points of view in each discussion/discussion forum. The second obstacle is that variations in the volume and target level of work difficulty cause varying completion times, also due to the capacity of employees in a work unit. The supporting factor obtained is that the performance in the R&D sector has all been regulated in Perbup Number 41 of 2022 concerning SOTK Bappeda Situbondo Regency, so that staff can carry out their respective duties without overlapping. The performance of the staff and good communication between staff also creates a harmonious work environment.*

PENDAHULUAN

Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) adalah lembaga pemerintah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan pembangunan daerah. Fungsi utama Bappeda adalah menyusun rencana pembangunan daerah, baik itu dalam bentuk rencana jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Bappeda juga berperan dalam pengkoordinasian dan evaluasi pelaksanaan program

pembangunan daerah, serta mengarahkan agar pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas daerah. Tidak hanya itu, BAPPEDA juga memiliki unsur-unsur organisasi yang sistematis, diantaranya: Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Pada setiap pada unsur organisasi BAPPEDA Kabupaten Situbondo tepatnya di Bidang Litbang yang didalamnya mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, program, anggaran, serta memfasilitasi dan penerapan di bidang penelitian dan pengembangan. (Suswandi, 2022) . Di Bidang Litbang ini juga memiliki tugas yang didalamnya terdapat program-program yang direncanakan dengan matang, setiap program tidak luput dengan pengelolaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan juga pertanggung jawaban, maka dengan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, yang tepat dan terarah, serta didukung dengan bukti-bukti administrasi seperti nota nota dan lainnya, maka pengelolaan keuangan daerah tersebut akan menjadi pengelolaan daerah yang efektif dan efisien.

Perihal pengelolaan keuangan daerah BAPPEDA berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Ma'ruf, 2013) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Akan tetapi, saat ini pedoman yang digunakan lebih dikembangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Melihat perencanaan dan penganggaran daerah yang harus berpedoman, tepat, tertib, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka perlu melihat implementasi atau pelaksanaan program kegiatan di bidang Litbang yang sesuai dengan RKPD tersebut dibiayai dan dapat terlaksana. Dari pelaksanaan yang dilakukan setiap bidang menunjukkan hasil yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan program kerja pada setiap bidang dan juga penganggaran yang ada pada setiap bidang di BAPPEDA Kabupaten Situbondo.

Penelitian yang akan kita lakukan ini akan melihat implementasi dan pelaksanaan program kegiatan di bidang Litbang yang sesuai dengan RKPD tersebut dibiayai serta dapat terlaksana dan sesuai dengan pedoman kebijakan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan juga Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (Kumolo, 2019) , dan dapat menjadi Pelajaran atau evaluasi di tahun berikutnya. Dengan begitu, Implementasi program di Bidang Litbang Bappeda Provinsi Jawa Timur dapat diketahui. Pada penelitian ini memiliki tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Mengetahui Implementasi Penelitian dan Pengembangan di Bidang (Litbang) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
2. Mengetahui faktor pendorong dan penghambat Implementasi Program Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan suatu pokok teori yang dijadikan dasar dari sebuah penelitian dan erat kaitannya dengan pembahasan ataupun analisis dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Sugiyono (2010: 54) mengatakan bahwa landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Beberapa aspek yang penting yang perlu dibahas dalam landasan teori antara lain:

Administrasi Publik

Administrasi Publik atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang

mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik (Tua Mulia Raja Panjaitan et al., 2021)

Administration public yang menjadikan Negara menjadi wakil sendiri untuk mengimplementasikan tugas-tugas kenegaraan atau pemerintahan, berfokus pada tugas kenegaraan atau pemerintahan pada public service menjadi administration by public yang berfokus kepada public demand are differentiated yang dimaknai sebagai tugas kenegaraan atau pemerintahan yang hanya menjadi penyedia fasilitas, serta mengkatalisasi dengan fokus terhadap putting the customers in the driver seat, bukan menjadi penyebab ataupun yang berperan pokok menjadi driving forces (Agus et al., 2022)

Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik umumnya ditetapkan oleh pihak pemerintah. Level kebijakan bisa berada pada tingkat umum, tingkat pelaksanaan, dan tingkat teknis. Suatu kebijakan dibuat secara sengaja, karena hendak mewujudkan tujuan tertentu. (Handoyo, 2012)

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahapan ketiga setelah tahap perumusan masalah kebijakan serta tahap formulasi dan adopsi kebijakan. Penentuan isi dan urutan tahapan proses kebijakan sendiri tidak bersifat statis (Yuliah, 2022).

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik (Aneta, 2010)

implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (Akib, 2010)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah di bagian bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari seorang pemimpin yaitu kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab terhadap Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam mengelola semua tugasnya supaya terjalankan seperti yang telah di rencana oleh pemerintah, maka pada sebuah organisasi harus bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugas tersebut (Juwita, 2023)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan salah satu lembaga

daerah yang mempunyai peranan strategis dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Lembaga ini bertugas menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai aspek yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan sejalan dengan prioritas dan kebijakan pemerintah daerah.

Fungsi utama Bappeda adalah memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan pendekatan yang terintegrasi, efisien, dan efektif, mencerminkan aspirasi masyarakat serta potensi dan karakteristik khas daerah. Dengan perannya sebagai lembaga perencanaan, Bappeda menjadi institusi kunci yang menjembatani berbagai kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiahnya (Rachman & Purnomo, 2024). Metode ini lebih menekankan pada makna atau pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi, bukan sekadar angka atau data kuantitatif. Penelitian kualitatif berupaya menggali informasi yang kompleks, mendalam, dan terperinci mengenai suatu fenomena, terutama yang belum banyak diketahui atau yang sulit diukur dengan pendekatan kuantitatif. Dengan metode pengumpulan data yang didapat dari observasi lapangan, wawancara dengan beberapa informan dari Kabid, Kasubid, hingga staf. Kemudian studi pustaka yang didapat dari berbagai regulasi, serta dokumentasi. Objek penelitian dilakukan di Bidang Penelitian dan pembangunan (Litbang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Situbondo.

Sejumlah teknik pengumpulan data digunakan dalam metode kualitatif, di antaranya adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman yang mendalam dari

narasumber, sementara observasi partisipatif memungkinkan mereka untuk menggali konteks secara langsung. Analisis dokumen membantu dalam memahami latar belakang dan konteks data yang telah ada. (Rachman & Purnomo, 2024)

Penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo, pada bulan Oktober-November. Penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling sebagai Teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini diambil berdasarkan pertimbangan tertentu. Yang dimaksud pertimbangan adalah orang yang kami anggap paling mampu dan menguasai terhadap apa yang kita harapkan. Sehingga dapat memudahkan penelitian yang kami laksanakan. Kriteria informan penelitian ini ialah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Situbondo.

Sumber data yang kita ambil adalah sesuai dengan apa yang disampaikan dan tindakan yang di sampaikan oleh informan. Dengan dukungan data data tertulis sebagai data tambahan. Data yang digunakan ada 2 yaitu:

1. Data primer, data ini data yang kita dapat saat melakukan wawancara dengan informan

dan observasi dengan objek penelitian.

2. Data sekunder, data yang kita dapat dari jurnal ilmiah dan buku.

Untuk menganalisa data penelitian ini kita menggunakan reduksi data. Yaitu merangkum hal hal yang sesuai topik penelitian, sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih jelas. Penelitian ini merupakan hasil data yang sesuai dengan fakta yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dan dari hasil observasi, dokumentasi, dan juga studi pustaka, Untuk selanjutnya akan diuraikan pembahasan terkait dengan tujuan dari penelitian tentang Implementasi Program Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di Bappeda Kabupaten Situbondo. Tujuan utama dari penelitian ini adalah ingin mengetahui hasil implementasi program penelitian dan pengembangan (Litbang) di Bappeda Kabupaten Situbondo.

Pada hasil wawancara implementasi program penelitian dan pengembangan di bidang Litbang di Bappeda kabupaten Situbondo yang dilihat dari standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan pada Bidang Litbang ini adalah. Di Bidang Litbang ini mengacu pada Renstra dan RPJMD, serta pada Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 (Suswandi, 2022) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

Hasil wawancara pada point selanjutnya yaitu terkait sumber daya yang digunakan pada bidang Litbang terdapat dua sumber yang digunakan. yang pertama adalah sumber pendanaan, dimana sumber pendanaan ini digunakan dalam proses pembuatan program, terkait kegiatan-kegiatan program yang dilakukan di bidang Litbang, serta pendanaan juga digunakan dalam pelaksanaan program agar program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dapat terlaksana dengan tepat. Sumber kedua adalah sumber daya manusia, jadi harus ada sumber daya manusia yang bisa melaksanakan tupoksi yang ada di Bidang Litbang ini. Seperti pada bidang Litbang perencanaan harus ada fungsional perencanaan, untuk analisis data harus ada tentang statistik, untuk evaluasi harus ada orang yang paham evaluasi. Sehingga dibutuhkan sumber sumber daya manusia yang ahli dalam bidang agar membantu dalam pelaksanaan program agar sesuai dengan tujuan dan sasaran Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Situbondo.

Hasil Wawancara Seputar Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Litbang Dari hasil wawancara diketahui bahwa komunikasi di Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kabupaten Situbondo berjalan dengan sangat baik. Hubungan kerja yang harmonis didukung oleh kerjasama antar karyawan, saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, produktif, dan sejalan dengan visi dan misi organisasi. Pada awal tahun, Divisi Litbang mulai melaksanakan program kerja dengan menyusun Rencana Kerja Tahunan. Rencana ini menjadi pedoman utama dalam merancang kegiatan dan program yang akan dilaksanakan selama setahun penuh. Dari rencana tahunan tersebut, divisi Litbang menyusun agenda kerja yang terstruktur dan terencana dari awal hingga akhir tahun. Agenda tersebut mencakup berbagai kegiatan strategis, inovasi dan evaluasi program yang ditujukan untuk mendukung pembangunan daerah. Setelah agenda kerja disusun, tugas dibagikan kepada masing-masing subkoordinator. Setiap subkoordinator bertanggung jawab untuk menjelaskan, mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas tersebut kepada staf di bawahnya. Proses pendelegasian ini dilakukan secara sistematis dan jelas, sehingga seluruh staf memahami peran dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan program kerja. Selain itu, Bidang

Litbang juga memastikan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja. Setiap anggota staf diberikan ruang untuk berkontribusi dalam diskusi dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Hal ini memungkinkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan program. Dengan komunikasi yang baik, kerjasama yang solid, dan pembagian tugas yang terorganisir, maka pelaksanaan program di bidang litbang dapat berjalan lancar dan efektif. Lingkungan kerja yang harmonis juga menjadi faktor penting yang menunjang keberhasilan setiap program, sekaligus memotivasi staf untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerjanya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Implementasi program di bidang litbang melibatkan berbagai tahapan pembuatan inovasi, perancangan, implementasi, hingga evaluasi. Dalam proses ini tidak dapat dipungkiri akan terdapat tantangan dan kesulitan yang mempengaruhi pencapaian tujuan program. Faktor Penghambat keberagaman persepsi dan latar belakang perbedaan pemahaman, persepsi dan latar belakang pegawai seringkali menimbulkan perbedaan pandangan dalam forum diskusi atau musyawarah sehingga dapat memperlambat pengambilan keputusan (Rusmin, 2024). Variasi volume dan tingkat kesulitan pekerjaan perbedaan tingkat kesulitan dan target pekerjaan mengakibatkan waktu penyelesaian yang tidak seragam. Hal ini juga dipengaruhi oleh kapasitas pegawai pada masing-masing unit kerja. Koordinasi dengan pihak eksternal ketika pelaksanaan program melibatkan pihak eksternal, maka staf litbang perlu beradaptasi untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik dan memastikan kolaborasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Faktor pendukung landasan regulasi yang kuat pelaksanaan tugas dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang SOTK Bappeda Kabupaten Situbondo (Suswandi, 2022). Hal ini memungkinkan setiap staf dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya tanpa tumpang tindih. Kinerja dan komunikasi yang baik kinerja staff yang optimal didukung oleh komunikasi yang efektif antar karyawan. Lingkungan kerja yang harmonis membantu terciptanya sinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Melalui upaya optimal mengatasi kendala dan memanfaatkan faktor pendukung, Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Situbondo dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Evaluasi yang berkesinambungan juga diperlukan untuk menghasilkan prestasi yang lebih baik di masa depan.

Hasil Wawancara Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Pada tahun 2024, Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Situbondo akan melaksanakan beberapa kegiatan besar yaitu Inotek (Inovasi dan Teknologi) dan IGA (Innovative Government Award). Inotek (Inovasi dan Teknologi) Inotek merupakan kompetisi tingkat provinsi yang diadakan di Jawa Timur. Salah satu kegiatan unggulan dalam program ini adalah OKE BOS ABK (Outbound Leadership dan Toga dan Berkebun Sayur untuk Terapi Anak Berkebutuhan Khusus) yang dilaksanakan di SMPN 2 Asembagus. IGA (Innovative Government Award) IGA merupakan kompetisi tingkat nasional yang menampilkan inovasi daerah. Kabupaten Situbondo membawa dua inovasi utama pada kompetisi ini, yaitu: Mangga Arum Merah, varietas unggul baru yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah. Sibesti (Situbondo Bebas Stunting), sebuah platform berbasis web yang memberikan akses informasi mengenai stunting di Kabupaten Situbondo. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah, setiap perangkat daerah, rumah sakit daerah, puskesmas, kecamatan, dan sekolah wajib menciptakan minimal satu inovasi baru setiap tahunnya (Suswandi, 2023). Kriteria inovasi yang diterima antara lain: Berisi pemutakhiran seluruh atau sebagian elemen inovasi. Memberikan manfaat nyata bagi daerah dan

masyarakat. Jangan membebani masyarakat. Ini urusan pemerintah daerah. Dapat direplikasi untuk diterapkan di tempat lain. Dengan inovasi seperti varietas unggul Mangga Arum Merah dan platform Sibesti, diharapkan Kabupaten Situbondo dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan solusi konkrit terhadap permasalahan prioritas, seperti perekonomian dan kesehatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai proses penyusunan program inovasi yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Setiap program disesuaikan dengan alokasi pendanaan, terdokumentasi dengan baik dalam laporan resmi, dan terintegrasi dengan bidang terkait lainnya. Inovasi yang diusulkan juga harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) yang berlaku. Hal ini memastikan setiap inovasi yang diangkat menjadi program kerja mempunyai nilai manfaat, relevansi dan dampak positif bagi daerah. Di Bidang Litbang Kabupaten Situbondo, sumber daya manusia (SDM) telah ditata secara terstruktur. Masing-masing staf bekerja sama dengan baik berdasarkan pembagian tugas yang telah ditentukan sejak awal. Sinergi dan kolaborasi antar jajaran ini berperan penting dalam percepatan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan, khususnya terkait inovasi yang direncanakan. Dengan pendekatan yang sistematis, kerjasama tim yang solid dan perencanaan yang matang, sektor litbang dapat memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan tidak hanya relevan dengan kebutuhan masyarakat, namun juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Hal ini mencerminkan komitmen Sektor Litbang untuk terus mendorong terciptanya inovasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di Bappeda Kabupaten Situbondo. Faktor Penghambat Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keragaman pemahaman, persepsi dan latar belakang pegawai. Perbedaan tersebut seringkali menimbulkan perbedaan pandangan dalam forum diskusi atau diskusi program, sehingga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan koordinasi kerja. Faktor Pendorong Faktor pendorong utama dalam terlaksananya program litbang adalah adanya landasan hukum yang jelas yaitu Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 41 Tahun 2022 tentang SOTK Bappeda Kabupaten Situbondo. Peraturan ini merupakan pedoman yang memastikan bahwa setiap kegiatan litbang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai. Selain itu, komunikasi yang efektif antar staf Litbang menjadi salah satu kekuatan utama. Kinerja pegawai yang berkualitas, sikap disiplin, etos kerja yang tinggi, dan kerjasama yang solid menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Kombinasi ini memungkinkan tercapainya hasil kerja yang optimal, laporan program yang akurat, dan keluaran program yang berkualitas. Lingkungan kerja yang kondusif tidak hanya memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan tugas, namun juga mempererat kolaborasi antar karyawan. Hal ini merupakan faktor kunci yang menunjang keberhasilan program Penelitian dan Pengembangan di Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Situbondo, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program.

Bidang litbang Bappeda Kabupaten Situbondo mengikuti kegiatan kompetisi yaitu Inotek (Inovasi dan Teknologi) yang dilaksanakan Provinsi Jawa Timur dan IGA (Innovative

Government Award) kompetisi tingkat nasional yang di selenggarakan oleh Kemendagri. Inotek (Inovasi dan Teknologi) Salah satu program unggulan dalam inovasi ini adalah OKE BOS ABK (Outbound Leadership dan Toga dan Berkebun Sayur untuk Terapi Anak Berkebutuhan Khusus). Program ini dilaksanakan di SMPN 2 Asembagus dan bertujuan untuk memberikan manfaat terapeutik bagi anak berkebutuhan khusus melalui kegiatan edukasi berkebun dan outbound. IGA (Innovative Government Award) IGA merupakan kompetisi inovasi tingkat nasional yang mengharuskan setiap daerah menghadirkan terobosan-terobosan yang unik dan bermanfaat. Kabupaten Situbondo menghadirkan dua inovasi unggulan dalam program ini, yaitu: Mangga Arum Merah, varietas mangga unggul baru yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. SIBESTI (Situbondo Bebas Stunting), sebuah platform berbasis web yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan data terkait upaya pencegahan stunting di Kabupaten Situbondo. Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 64 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah, setiap perangkat daerah, rumah sakit daerah, puskesmas, kecamatan, dan sekolah wajib menciptakan minimal satu inovasi baru setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk mendorong lahirnya ide-ide kreatif dan solusi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Agus, A. M., Iwan, H., Kusnadi, H., Eka, P., Bambang, P., Kadek, I., Dwi, W., Muhammad, W., Baihaqi, R., Fitriyatul, A., Rudy, B., Harianto, P., & De Grave, A. (2022). *TEORI ADMINISTRASI PUBLIK* (D. P. S. Sari, Ed.; 1st ed.). PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 01–11.
- Aneta, A. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DI KOTA GORONTALO. *Jurnal Administrasi Publik*, 1 Nomer 1.
- Handoyo, E. (2012). *KEBIJAKAN PUBLIK* (Mustrose, Ed.). Widya Karya Semarang.
- Juwita, R. (2023). *PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP PRESTASI KERJA PENGELOLA PERPUSTAKAAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NAGAN RAYA*.
- Kumolo, T. (2019). *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH*.
- Ma'ruf, M. (2013). *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*.
- Rachman, A., & Purnomo, H. (2024). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D* (J. Saba, Ed.; CV Saba Jaya). CV Saba Jaya Publisher.
- Rusmin. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG RENDALEV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(3).
- Suswandi, K. (2022). *PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO*.

- Suswandi, K. (2023). *PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 94 TAHUN 2022 TENTANG INOVASI DAERAH*.
- Tua Mulia Raja Panjaitan, D., Piki Darma Kristian Pardede, M., & MSi, Ss. (2021). *ADMINISTRASI PUBLIK*. CV. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Yuliah, E. (2022). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30 Nomer 2, 129–153.